

MENELISIK KEBERPIHAKAN KEBIJAKAN KKP DALAM PERLINDUNGAN NELAYAN KECIL DI TENGAH PANDEMI COVID-19

www.seknasfitra.org



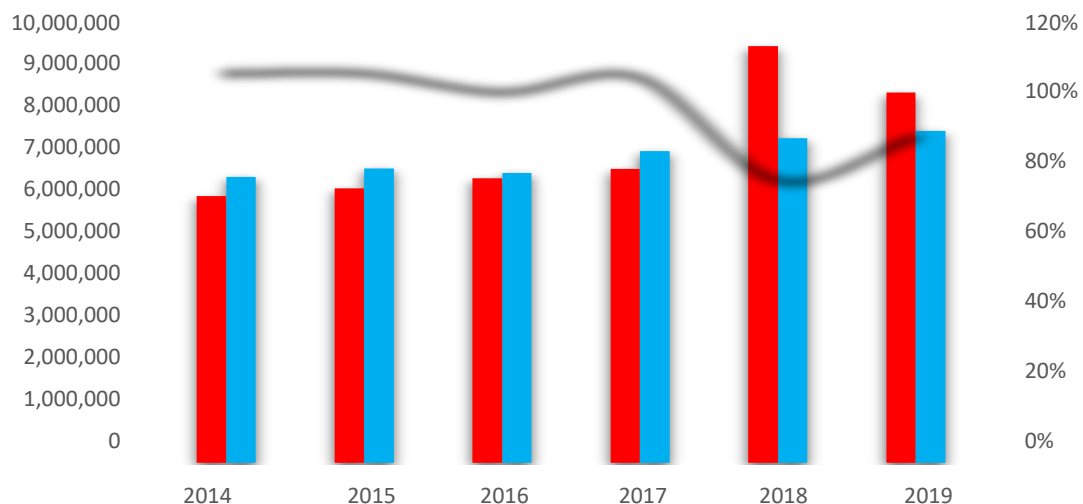
Pandemi Covid-19 telah memukul berbagai sektor kehidupan di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Khusus pada sektor kelautan dan perikanan, nelayan kecil menjadi komunitas yang merasakan dampak paling parah. Berdasarkan data BPS, dampak pandemi terasa oleh nelayan dari mulai bulan Februari hingga April.

Hal tersebut terjadi karena harga ikan di sebagian wilayah turun akibat penurunan jumlah konsumsi masyarakat dan penurunan ekspor. Penurunan harga berdampak pada tidak sebandingnya antara pendapatan nelayan dan dana operasional melaut.

Secara kuantitas, masyarakat Indonesia yang bermata pencaharian sebagai nelayan pada tahun 2014-2017 berjumlah diantara 2,7juta menurun menjadi 2,6 juta. Sedangkan pada tahun 2018, terjadi penurunan cukup dratis pada jumlah masyarakat Indonesia yang bermata pencaharian sebagai nelayan, yaitu 2,01 juta.¹

Dari jumlah tersebut, produksi perikanan Nasional pada tahun 2019 mencapai 7,5 juta dari target 8,4 juta. Pada tahun 2020, target produksi perikanan tangkap sebanyak 8,02 juta ton. Namun akibat pandemi Covid-19, pemerintah melakukan revisi target menjadi 7,7 juta ton.

Target dan Produksi Perikanan Tahun 2014-2019

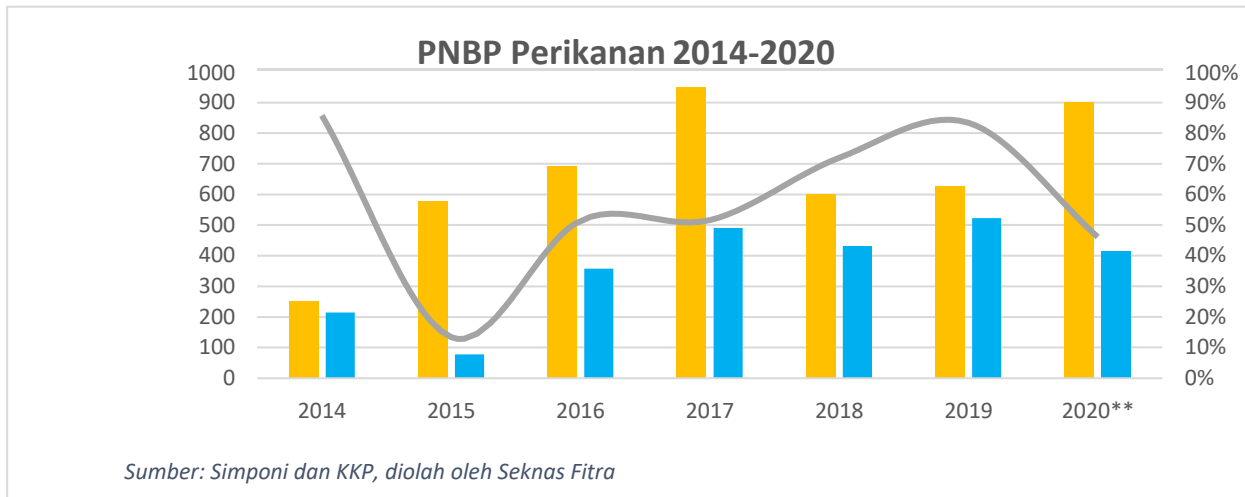


Sumber: KKP 2020, diolah oleh Seknas Fitra

¹ Data tahun 2018 merujuk pada <https://statistik.kkp.go.id/>

Produksi perikanan dari tahun 2014-2019, rata-rata 6 tahun nilai volume produksi perikanan mencapai 169 Triliun per tahunnya. Namun nilai produksi perikanan tersebut tidak sebanding dengan tingkat kesejahteraan nelayan. Dari 2 juta nelayan, 25% nya berpotensi menjadi miskin.

Data tersebut didukung dari hasil Survei Susenas pada tahun 2017, menunjukkan adanya kecenderungan tingkat kemiskinan agregat tertinggi nelayan, dibandingkan rata-rata perdesaan dan sektor pertanian lainnya.²



Sumbangsih PNBP sektor perikanan dalam kurun waktu 2014-2020 tidak pernah menyentuh angka 1 Triliun. Padahal jika merujuk pada jumlah produksi dengan rata-rata 6 juta ton per tahun dan nilai produksi mencapai 168 Triliun per tahunnya, target PNBP sektor kelautan tidak pernah lebih dari 1% atau tepatnya 0,36% dari total potensi, bahkan realisasinya pun tidak pernah melampaui target yang direncanakan dalam Renja KKP.

Seknas Fitra melihat ada berbagai faktor yang menyebabkan realisasi PNBP sektor kelautan tidak maksimal, seperti:

1. Dasar penentuan PNBP berdasarkan tonase kapal, jenis kapal, kekuatan mesin dan alat tangkap. Tidak mengacu pada jumlah produksi Ikan. Akibatnya berapapun hasil tangkapan nelayan dalam satu tahun tetap dihitung berdasarkan skala kapal, produktivitas kapal dan HPI. Berbeda dengan skema PNBP di sektor kehutanan, dasar penentuannya berdasarkan jumlah produksi kayu.
2. Rendahnya target dan realisasi PNBP perikanan tangkap diduga penetapan formula terutama PHP (Pungutan Hasil Perikanan) tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. PHP dikenakan pada saat perusahaan memperoleh atau memperpanjang surat ijin penangkapan ikan (SIPI).

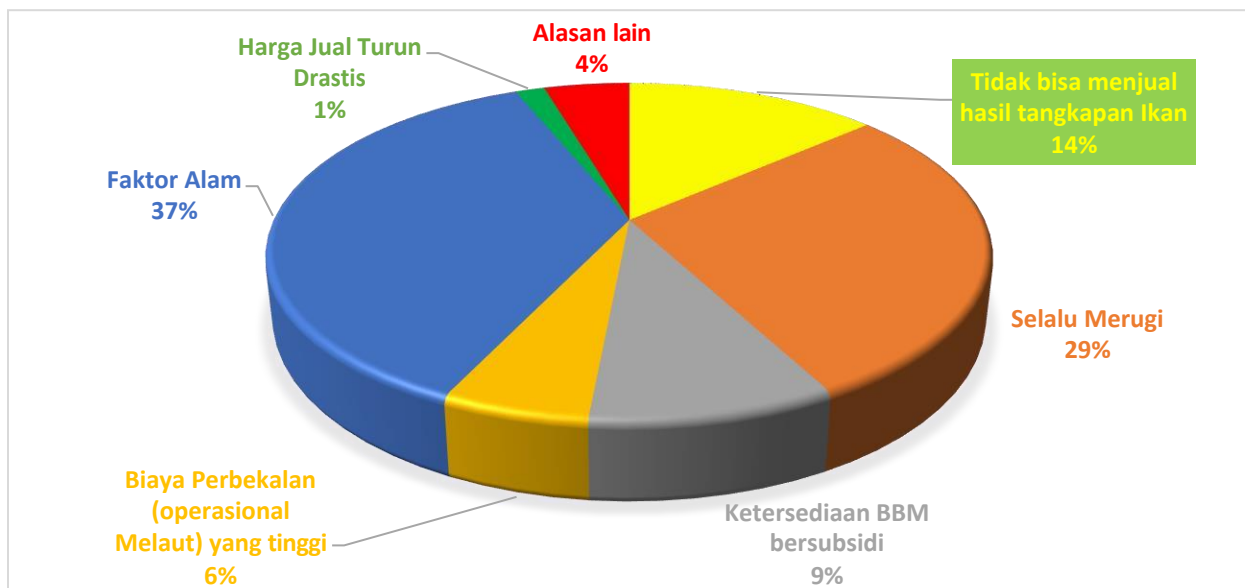
² Zuzy Anna, Orasi Ilmiah: Pemanfaatan Model Bio-Ekonomi Dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Yang Berkelanjutan Tahun 2019.

Permasalahan Kesejahteraan Nelayan

Pandemi Covid 19, berpengaruh pada tingkat kesejahteraan nelayan. Tingkat pendapatan nelayan turun hingga mencapai 90% akibat hasil produksi ikan dari nelayan tidak laku dijual sehingga nelayan terus merugi.

Temuan tersebut diperkuat berdasarkan survei yang dilakukan oleh Perkumpulan Inisiatif dan KNTI, permasalahan yang dihadapi nelayan selama ini, diperparah akibat pandemi Covid-19, seperti harga jual turun drastis, tidak bisa menjual tangkap ikan, selalu merugi. Permasalahan tersebut berkaitan dengan permintaan yang cenderung turun di masa pandemi akibat tingkat konsumsi rumah tangga yang juga ikut turun. Selain itu, permintaan ekspor yang menurun hingga 30-40% juga berdampak pada semakin menumpuknya ikan, hingga tidak laku dijual.

Permasalahan lain yang dihadapi nelayan adalah akses nelayan pada BBM bersubsidi. BBM bersubsidi hingga 60% pada beban operasional nelayan. Selama ini, banyak nelayan yang kesulitan mengakses BBM bersubsidi sehingga daripada tidak melaut lebih baik menggunakan BBM yang dijual dengan harga normal. Tentu perbedaan harga tersebut berdampak pada meningkatnya biaya operasional. Pandemi Covid 19 telah memperparah kondisi nelayan sehingga nelayan semakin sulit untuk melaut karena modalitas yang dimiliki nelayan harus tergerus untuk memenuhi kebutuhan sehari-seharinya.



Realokasi dan Refocusing Anggaran KKP

No	Unit Eselon	PAGU DIPA Awal	PAGU Realokasi (Kesimpulan Raker DPR 25 Feb 2020)	Rincian Penghematan			PAGU APBN-P	% Thp PAGU APBN-P
				Penghematan (PERPRES 54/2020)	Penghematan (SURAT MENKEU S-302)	Total Penghematan		
1	DJPT	702.462.450	657.462.450	159.417.764	28.427.362	187.845.126	469.617.324	10,21%
2	DJPB	739.572.614	1.039.572.614	245.519.709	72.997.218	318.516.927	721.055.687	15,67%
3	DJ PDS	366.017.696	321.017.696	101.993.267	57.053.634	159.046.901	161.970.795	3,52%
4	DJ PRL	507.850.023	469.850.023	185.818.598	75.743.842	261.562.440	208.287.583	4,53%
5	DJ PSDKP	1.062.575.107	1.005.875.107	258.298.803	49.687.219	307.986.022	697.889.085	15,17%
6	BRSDMKP	1.868.216.577	1.773.216.557	31.332.232	334.891.874	366.224.106	1.406.992.451	30,59%
7	BKIPM	601.075.586	586.075.586	72.823.518	25.148.528	97.972.046	488.103.540	10,61%
8	SETJEN	515.623.761	510.323.761	84.752.020	43.927.967	128.679.987	381.643.774	8,30%
9	ITJEN	85.267.955	85.267.955	8.000.000	12.563.416	20.563.416	64.704.539	1,41%
	JUMLAH	6.448.661.769	6.448.661.749	1.147.955.911	700.441.060	1.848.396.971	4.600.264.778	100%

Sumber: data olah Fitra

Kebijakan Pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) no 4 tahun 2020 tentang realokasi dan refocusing anggaran berdampak pada anggaran belanja KKP TA 2020 yang semula dialokasikan sebesar Rp6,45 T direvisi menjadi Rp.5,3 T, turun 1,4 T. Bahkan sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-302/MK.02/2020, tanggal 15 April 2020, anggaran belanja KKP turun lagi menjadi Rp4,6 T atau dikurangi sekitar Rp1,84 T.

Pada bulan Agustus 2020, berdasarkan SK Kemenkeu no S-180/2020, mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 474 M, sehingga pagu anggaran KKP menjadi 5,075T. Tambahan anggaran tersebut diperuntukan untuk program pengelolaan sumber daya perikanan tangkap dalam Ditjen Perikanan Tangkap, sebesar 89,6 miliar. Program pengelolaan sumber daya perikanan tangkap dalam Ditjen Perikanan Budidaya, tambahannya sebesar 297,15 M. sementara itu, untuk program penguatan daya saing produk perikanan dalam Ditjen Daya Saing Perikanan mendapatkan tambahan sebesar Rp 36,07M. Program Ruang Laut dalam Ditjen Pengelolaan Ruang Laut sebesar 48,1 dan tambahan untuk Inspektot KKP sebesar 4,98 M.

Minimnya Program dan Kegiatan Perlindungan Bagi Nelayan Kecil di Kementerian KKP

Policy Brief ini fokus pada perlindungan nelayan. Pada Kementerian KKP, Ditjen Perikanan Tangkap yang menaungi urusan nelayan. Batasan pengertian nelayan yang dimaksud dalam *Policy Brief* ini adalah nelayan kecil, nelayan tradisional, dan buruh nelayan. Dalam pengertian, nelayan yang tujuan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 gross ton (GT).³

Dalam melihat keberpihakan perlindungan mengacu pada UU no 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam. Strategi perlindungan nelayan dalam UU tersebut antara lain:

1. Penyediaan prasarana Usaha Perikanan
2. Kemudahan Akses dalam memperoleh sarana Usaha Perikanan;
3. Jaminan Kepastian Usaha
4. Jaminan risiko Penangkapan Ikan
5. Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi
6. Pengendalian Impor Komoditas Perikanan
7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan; dan
8. Fasilitasi dan bantuan hukum.

Dalam konteks Penanganan dan pemulihan ekonomi dampak dari pandemi covid-19, perlindungan nelayan yang relevan berkaitan dengan kemudahan akses dalam memperoleh sarana usaha perikanan dan kepastian usaha. Karena yang dibutuhkan oleh nelayan saat ini berkaitan dengan kepastian distribusi hasil produksi, bantuan modal, dan akses prasarana yang mendukung nelayan untuk dapat melaut kembali.

Untuk memudahkan dalam melihat detail kegiatan yang menjadi bagian dari “Perlindungan Nelayan”, Seknas Fitra membaginya ke dalam 2 kluster kegiatan.

Pertama, kegiatan yang berdampak langsung pada kepentingan nelayan sebagai bagian dari perlindungan sosial nelayan. **Kedua**, kegiatan yang tidak berdampak langsung bagi kepentingan nelayan, kegiatan lain yang berdampak pada pelabuhan, perizinan, alat tangkap dan pengelolaan sumber daya ikan.

Pembagian kluster kegiatan tersebut didasarkan dengan hipotesis Seknas Fitra yang terkonfirmasi dari data Ditjen PT, bahwa nelayan kecil masih minim dalam mendapatkan perlindungan dari pemerintah, yang didalamnya termasuk perlindungan asuransi, perlindungan sosial, dan bantuan permodalan. Perlindungan bagi nelayan merupakan hal penting dan mendesak. Nelayan memiliki kerentanan jatuh miskin. Kesulitan dalam akses kredit, rendahnya keanggotaan dalam kelembagaan nelayan, ikut mempercepat kerentanan nelayan.

³Definisi nelayan pada UU No 7 Tahun 2016



Sumber: RDP KKP dengan DPR RI September 2020 diolah oleh Seknas Fitra

Terlebih di situasi Pandemi Covid-19, Nelayan kecil memiliki kerentanan terperosok pada jurang kemiskinan. Secara umum, realisasi anggaran berdasarkan Unit kerja, Badan Riset SDM KKP yang realisasinya paling tinggi sampai per 11 September 2020. Sedangkan realisasi Ditjen Perikanan Tangkap masih 51% dari total Pagu anggaran. Merujuk pada pernyataan Direktur Perikanan Tangkap, realisasi per bulan Ditjen PT sebesar 13,75%.

Pagu Anggaran untuk Ditjen Perikanan Tangkap sebesar 566 miliar. Anggaran tersebut diperuntukan bagi 21 kegiatan. Kegiatan yang berdampak langsung pada perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Dalam pengertian nelayan sebagai penerima manfaat secara langsung, hanya ada 2 kegiatan yaitu

1. Fasilitasi asuransi mandiri dan perlindungan nelayan dengan target 20.000 kepesertaan dengan alokasi anggaran Rp 816 juta.
2. Peningkatan Kapasitas Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan dengan target 2.250 kepesertaan dengan alokasi anggaran Rp. 1, 076 M.

Kegiatan dalam kluster Perlindungan bagi Nelayan secara output masih belum sebanding dengan jumlah nelayan di Indonesia, yang berjumlah 2.011.455 Nelayan.⁴ Dipertegas juga, pada tahun 2020, baru 988.539 orang yang menjadi anggota KUSUKA.⁵ Itu artinya, lebih dari 1 juta Nelayan masih belum secara komperhensif terdata. Tidak terdatanya nelayan bisa berdampak pada ketidakefektifan program perlindungan nelayan.

Secara konsep dan tujuan, KUSUKA dengan diperkuat melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 39/2017 sebagai landasan hukum pelaksanaan kegiatan Kartu KUSUKA, sebagai langkah strategis dalam upaya pendataan nelayan dan efektifitas implementasi program dan kegiatan yang berdampak pada perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Namun memang, proses pendataan KUSUKA masih mengalami kendala, seperti data KUSUKA harus dimasukkan dalam satu server yang terpusat di Kementerian KKP, namun server tersebut sering mengalami kendala sehingga menyulitkan proses pendataan.⁶

⁴ Data tahun 2018 merujuk pada <https://statistik.kkp.go.id/>

⁵ https://satudata.kkp.go.id/dashboard_kusuka

⁶ <https://radarmadura.jawapos.com/read/2019/07/05/144672/puluhan-ribu-nelayan-tanpa-kartu-kusuka>

Belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan Berdasarkan Fungsi

Realisasi berdasarkan fungsi, belanja pegawai masih dominan dalam serapan anggaran Kementerian KKP tahun 2020. Dengan jumlah 13.049 pegawai yang tersebar di pusat dan daerah, serapan anggaran pada belanja pegawai akan pasti setiap bulannya. Terlihat, bahwa dari Pagu 1,8 T, telah terserap 1,2 T atau 65% dari total Pagu.

Sedangkan belanja Barang diperuntukan untuk bantuan sarana prasarana bagi masyarakat dan pemerintah daerah untuk pengadaan bioflok, excavator, minipadi, PITAP, maggot, Cold storage, sentra kuliner, sarana usaha penggaraman, rehabilitasi mangrove, operasional penyuluh, pelatihan, karantina pengawasan sumber daya kelautan, dan perikanan. Selain itu juga untuk biaya pemeliharaan asset, perjalanan dinas, dan PNBP. Kegiatan belanja barang dan jasa lebih banyak diperuntukan bagi penerima manfaat dalam naungan Ditjen Pembudayaan, Ditjen Produk Daya Saing Kelautan, dan Badan Riset SDM KKP.

Peruntukan belanja modal untuk pengadaan kapal pengawas perikanan, laboratorium, sarana prasana pendidikan dan riset, peralatan uji mutu, sarana prasarana di Balai budidaya, dan lain-lain.

Jika ditelaah secara umum, fokus belanja Ditjen KKP lebih banyak untuk kegiatan Operasional SKPT dan PP Perintis dengan alokasi anggaran Rp. 15,01 M, Pembinaan kegiatan pengelolaan pelabuhan perikanan dengan alokasi anggaran 10 M dan Kegiatan Pendukung dengan alokasi anggaran Rp. 74 M. Belanja yang berpihak pada nelayan kecil secara khusus dan nelayan secara umum masih belum nampak secara signifikan pada kebijakan belanja Kementerian KKP di tahun anggaran 2020.



Sumber: data olah Seknas Fitra dari Kementerian KKP per September 2011.

Kebijakan Kementerian Perikanan dan Kelautan dalam Melindungi Nelayan Kecil di Tengah Ancaman Dampak Pandemi Covid-19

Tabel Rekapitulasi Kegiatan Dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Dampak Covid-19 Sektor Kelautan Dan Perikanan Tahun 2020

NO	KEGIATAN		VOLUME	SATUAN	HARGA (Rp 000)	JUMLAH (Rp.000)
1	Bakti Nelayan	Ditjen Perikanan Tangkap	31	lokasi	314.444	9.747.770
2	Bantuan Benih Tawar, Payau dan Laut	Ditjen Perikanan Budidaya	215,75	juta ekor	0,26	56.095.000
3	Bantuan Induk	Ditjen Perikanan Budidaya	1.000.000	ekor	42	41.737.853
4	Bantuan Bibit Rumput Laut	Ditjen Perikanan Budidaya	200.000	kg	30	5.945.112
5	Bioflok	Ditjen Perikanan Budidaya	371	paket	198.035	73.471.093
6	Minapadi (padat karya)	Ditjen Perikanan Budidaya	100	paket	45.000	4.500.000
7	PITAP (padat karya)	Ditjen Perikanan Budidaya	10	paket	350.000	3.500.000
8	Ikan Hias	Ditjen Perikanan Budidaya	50	paket	35.000	1.750.000
9	Asuransi usaha budidaya	Ditjen Perikanan Budidaya	5.000	hektar	700	3.500.000
10	Bantuan pakan	Ditjen Perikanan Budidaya	1.500.000	kg	9	13.268.271
11	Mesin pakan mandiri dan bahan baku	Ditjen Perikanan Budidaya	20	paket	110.000	2.200.000
12	Percontohan budidaya Maggot di UPT	Ditjen Perikanan Budidaya	1	paket	2.300.000	2.300.000

13	Percontohan budidaya Maggot di Masyarakat	Ditjen Perikanan Budidaya	1	paket	2.400.000	2.400.000
14	Bantuan sarana mendukung revitalisasi tambak	Ditjen Perikanan Budidaya	108	paket	235.000	25.380.000
15	Bantuan sarana budidaya laut	Ditjen Perikanan Budidaya	162	paket	190.000	30.780.000
16	sarana dan prasarana pengadaan dan penyimpanan/cold storage	Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan	3	paket	2.458.078	7.374.234
17	Perluasan Gemarikan	Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan	55	lokasi	370.969	20.403.283
18	Promosi Gemarikan (reguler)	Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan	55	lokasi	141.477	7.779.571
19	Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGAR)-padat karya	Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	150	Ha	153.139	22.970.854
20	Rehabilitasi Kawasan Mangrove (padat karya)	Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	200	Ha	35.953	7.190.578
21	Pelatihan Masyarakat	Badan Riset SDM KKP	10.000	orang	684	6.842.448
22	Bulan Bakti Karantina Ikan	Badan Karantina Ikan	47	lokasi	187.691	8.821.469
JUMLAH						357.363.102

Sumber: Data Olah Seknas Fitra. Bahan Tayang KKP dalam RPD dengan Komisi IV DPR RI

Program dan kegiatan yang dibuat oleh KKP sebagai prioritas pemulihan ekonomi dampak dari Covid-19, belum secara efektif mengatasi permasalahan nelayan. Terlihat dari program kegiatan yang belum fokus pada target sasaran, jika melihat pada kuantitas program maka nelayan seperti tidak masuk dalam prioritas KKP. KKP lebih banyak menggelontorkan kegiatan di Ditjen Perikanan Budidaya. Selain itu, Jika dilihat **secara detail pada aspek anggaran dan output kinerja maka program dan kegiatan prioritas di KKP cenderung tidak fokus dan terpisah-pisah. Dari 22 kegiatan, secara kuantitas output jumlahnya sedikit, pun juga dengan alokasi anggarannya**

Tabel: Rincian Kegiatan Prioritas Pemulihan Ekonomi di Ditjen Perikanan Tangkap T.A 2020

Detail Kegiatan	Indikator Output Kegiatan
Penyemprotan Disinfektan	4.247 Kapal, 379 UPI, 36 TPI
Fasilitas Kebersihan tangan	2.777 tempat cuci tangan 7.086 hand sanitizer
Pembagian APD	43.501 masker 9.496 APD Lainnya
Pemberian Sembako	13.707 Orang (10.715 nelayan dan 2.992 Non Nelayan)
Pemberian vitamin dan herbal lainnya	8.428 nelayan dan 7.744 non nelayan.
Pojok pendanaan	269 nelayan dengan 74 debitur dengan nilai kredit 9,5 miliar
Pembagian Nasi Ikan	36.732 paket dan lebaran ikan 2.825 paket

Sumber: KKP September 2020, diolah oleh Seknas Fitra

Disampaikan dalam oeh Menteri KKP, Rapat Dengar Pendapat KKP dengan Komisi IV DPR RI pada 6 April 2020, terdapat 22 program prioritas dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi dampak Covid 19 di KKP. Dari 22 program tersebut, penanggungjawab kegiatan terbagi dalam 12 kegiatan di Ditjen Pembudidayaan, 3 kegiatan dinaungi oleh Ditjen Daya Saing Produk Kelautan, 4 kegiatan dinaungi Badan Riset SDM KKP, dan 1 kegiatan dinaungi ditjen Perikanan Tangkap, yaitu Bakti Nelayan.

Kegiatan prioritas bagi nelayan lebih merupakan bantuan sosial dan sedikit bantuan pemberdayaan ekonomi. Ditjen Perikanan Tangkap lebih banyak memfokuskan pada mitigasi penularan Covid-19. Kegiatan tersebut juga penting, tetapi seharusnya KKP memiliki prioritas yang benar-benar dibutuhkan oleh nelayan dengan tujuan keberlanjutan, bukan sebatas seremonial bantuan saja. Bantun kesehatan merupakan kegiatan penting di tengah pandemi, namun tidak cukup sekadar itu saja. KKP perlu juga memikirkan langkah strategis dalam mitigasi supaya nelayan dapat bertahan secara ekonomi di tengah pandemi. Seperti menambah bantuan permodalan, mempermudah nelayan dalam mengakses prasarana kebutuhan melaut, dan membukakan jalan bagi nelayan dalam mendistribusikan hasil produksi ikannya.

Jika membandingkan kegiatan di ditjen lain, seperti Ditjen Pembudidayaan, banyak bantuan yang sifatnya padat karya dan menstimulus pertumbuhan ekonomi bagi penerima manfaatnya seperti kegiatan pemberian bantuan bibit, asuransi usaha budi daya, bantuan modal dalam bentuk pengelolaan tambak partisipatif, pengembangan usaha garam rakyat, dan kegiatan lainnya. Ditjen Perikanan Tangkap yang menaungi 2 juta nelayan, program prioritasnya cenderung tidak berdampak signifikan dalam penyelesaian masalah yang dihadapi nelayan atau mendorong pemulihan ekonomi nelayan.

Kesimpulan:

1. Program dan Kegiatan Prioritas di KKP dalam upaya pemulihan ekonomi akibat Pandemi Covid 19, masih terpisah-pisah dan belum fokus pada permasalahan yang dihadapi oleh nelayan.
2. Nelayan belum banyak yang terdata sehingga menyulitkan dalam mendistribusikan bantuan.
3. Terdapat 3 permasalahan utama nelayan, seperti selalu merugi, hasil produksi tidak laku terjual, dan sulitnya akses BBM bersubsidi.
4. Realisasi anggaran KKP masih belum maksimal
5. Pemerintah belum memaksimalkan potensi produksi Perikanan menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rekomendasi:

1. **KKP harus memetakan skala prioritas kebutuhan nelayan kecil.**
KKP telah merencanakan program prioritas pemulihan ekonomi akibat Pandemi Covid 19, namun program dan kegiatan tersebut belum menyentuh persoalan, khususnya bagi nelayan. KKP perlu melakukan pemetaan secara komprehensif untuk menentukan prioritas bantuan, urgensi, dan ketepatan penerima manfaatnya. Untuk keberlangsungan hidup di tengah nelayan yang tidak melaut maka dibutuhkan bantuan langsung (BLT). Untuk mengatasi permasalahan kebutuhan dana operasional melaut maka pemerintah perlu memberikan kemudahan dalam penyaluran kredit, sebagai bentuk bantuan permodalan. Sedangkan untuk menjaga rantai pasok maka diperlukan intervensi pemerintah dalam membangun kerjasama dengan instansi atau stakeholder lain dalam mendistribusikan hasil tangkapan ikan sehingga tingkat konsumsi tetap terjaga.
2. **KKP Harus melakukan Pendataan Nelayan Secara Komprehensif**
Database nelayan menjadi acuan dalam pemberian bantuan pemerintah. Jika merujuk pada pendataan Kusuka, maka baru 900ribu nelayan yang sudah terdata, artinya masih ada 1,1 juta nelayan yang belum didata sehingga berpotensi tidak mendapatkan manfaat dari bantuan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
3. **Mendorong Peningkatan Konsumsi Perikanan dari Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya.**
Pemerintah telah membuat kebijakan peningkatan konsumsi ikan melalui safari gemar makan ikan. Kebijakan tersebut perlu ditingkatkan untuk meningkatkan konsumsi ikan dan mendorong tingkat produksi nelayan.
4. **Dalam mendorong percepatan realisasi anggaran, mencapai output kinerja dan manfaat bagi masyarakat, maka unit kerja di KKP harus saling berkolaborasi dari tingkat pusat hingga daerah.**
Serapan anggaran KKP masih rendah. Dalam mendorong peningkatan serapan anggaran perlu adanya kolaborasi dari level pusat dan daerah. Selain itu juga perlu adanya juklak dan juknis dalam penggunaan anggaran sehingga realisasi anggaran tidak sekadar keterserapan anggaran saja, namun juga memiliki dampak dan manfaat bagi masyarakat, khususnya nelayan.

5. Perlu melakukan revisi regulasi terkait dengan pemungutan PNBP supaya potensi produksi perikanan mampu secara maksimal menghasilkan PNBP.

Potensi produksi ikan Indonesia sangat besar, namun realitasnya belum mampu dimaksimalkan menjadi PNBP. Faktor penghambatnya salah satunya karena regulasi yang masih belum mendukung. Sehingga perlu dilakukan revisi regulasi dari mulai peraturan Pemerintah No Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 dan Permen KKP no 46 tahun 2016.

